



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	5 (<i>lima</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Badan Pengusahaan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS)
Hari, Tanggal	:	Rabu, 26 Agustus 2020
Pukul	:	19.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2019; dan 2. <i>Progress</i> Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Rully Indrawan; 3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad Rudi; 4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS), Razuardi beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) pada pukul 19.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/08459/DPR RI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2019 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2021.

II. KESIMPULAN

A. ESELON I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM untuk pengambilan keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 94,10% atau sebesar Rp904.735.506.509 (*Sembilan Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp961.432.185.000 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mendukung upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 paling lama dalam jangka waktu 6 (*enam*) bulan.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (*enam*) tahun berturut-turut sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan realisasi anggaran Tahun 2020 per 25 Agustus 2020 sebesar Rp299.750.829.420 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) atau sebesar 46,13% dari total Pagu Anggaran sebesar Rp649.771.358.000 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi di Tahun 2020.
5. Dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kegiatan pelaku usaha mikro. Kementerian Koperasi dan UKM per 11 Agustus 2020 mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro ditahun 2020. Dengan adanya Anggaran Belanja Tambahan tersebut, maka Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sebesar Rp22.664.572.008.000 (*Dua Puluh Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ribu Rupiah*), dan realisasi per 25 Agustus 2020 sebesar Rp2.699.750.829.420 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) atau sebesar 11,91%. Dengan realisasi yang masih rendah, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro serta melakukan sinergi secara komprehensif dengan instansi terkait melalui pengawasan Komisi VI DPR RI.

B. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

1. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) atas realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar 75,83% atau sebesar Rp1.565.257.279.198 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp2.064.194.953.000 (*Dua Triliun Enam Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (*empat*) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan realisasi Anggaran Tahun 2020 sampai dengan Juli 2020 sebesar Rp539.178.899.445 (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 26,00% dari total Pagu Anggaran sebesar Rp2.073.880.490.000 (*Dua Triliun Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.

C. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

1. Komisi VI DPR RI dapat menerima penjelasan dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) atas realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar 84,61% atau sebesar Rp187.330.729.253 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp221.429.833.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 (*empat*) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan realisasi anggaran Tahun 2020 per 30 Juli 2020 sebesar Rp32.582.304.293 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 29,58% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp110.143.715.000 (*Seratus Sepuluh Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) dan mendorong untuk meningkatkan capaian realisasi Tahun 2020.

Catatan:

Menindaklanjuti Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 22.40 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352**